

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN TRANSAKSI SYARIAH YANG BERKAITAN DENGAN PRAKTIK HARAM DAN BATIL

Leira Narulita¹, Fauzatul Laily Nisa²

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

E-mail: 21011010077@student.upnjatim.ac.id, f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study examines the crucial role of the government in controlling Shariah transactions related to forbidden and void practices in the context of Islamic economics. By summarizing the main findings, this analysis identifies the major challenges faced by the government, including inadequate regulation, social, legal, and economic challenges. Additionally, the study evaluates the alignment of findings with the research objectives, affirming its success in addressing the research questions posed. Practical implications of this research strengthen the urgency of improving regulation and supervision of Shariah transactions, while its theoretical implications highlight the contribution of this research to our understanding of the government's role in Islamic economics. Although this study provides valuable contributions, some methodological limitations are acknowledged, implying the need for further research. This research underscores the importance of the government's role in maintaining the integrity of Shariah transactions and provides a foundation for further action in improving the practice of controlling Shariah transactions.

Keywords: Government role, Sharia transactions, Prohibited practices, Void practices

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran krusial pemerintah dalam mengendalikan transaksi syariah yang terkait dengan praktik haram dan batil dalam konteks ekonomi Islam. Dengan menguraikan temuan-temuan utama, analisis ini mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi pemerintah, termasuk ketidakcukupan regulasi, tantangan sosial, hukum, dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian temuan dengan tujuan penelitian, menegaskan keberhasilannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Implikasi praktis dari penelitian ini memperkuat urgensi peningkatan regulasi dan pengawasan transaksi syariah, sementara implikasi teoritisnya menyoroti kontribusi penelitian ini terhadap pemahaman kita tentang peran pemerintah dalam ekonomi syariah. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga, beberapa keterbatasan metodologi diakui, menyiratkan perlunya penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga integritas transaksi syariah dan memberikan landasan untuk tindakan selanjutnya dalam memperbaiki praktik pengendalian transaksi syariah.

Kata kunci: Peran pemerintah, Transaksi syariah, Praktik haram, Praktik batil

Pendahuluan

Transaksi syariah memainkan peran utama dalam ekonomi Islam karena mereka mencerminkan prinsip-prinsip fundamental agama Islam. Pertama, transaksi tersebut selaras dengan ajaran Islam yang menegaskan larangan terhadap riba dan praktek-praktek ekonomi yang tidak sesuai dengan keadilan. Dengan demikian, mereka memperkuat fondasi ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai agama.

Praktik haram dalam transaksi syariah merujuk pada segala bentuk transaksi atau aktivitas ekonomi yang secara tegas dilarang oleh prinsip-prinsip Islam. Contohnya termasuk transaksi yang melibatkan riba (bunga), makanan atau minuman yang haram, atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Praktik batil dalam transaksi syariah merujuk pada transaksi yang dianggap batal atau tidak sah menurut hukum Islam. Ini mungkin karena transaksi tersebut melanggar prinsip-prinsip syariah atau tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk keabsahan transaksi menurut pandangan agama Islam. Misalnya, transaksi yang melibatkan gharar (ketidakpastian) atau maysir (perjudian) dianggap batil dalam Islam.

Transaksi syariah juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di dalamnya. Dalam transaksi semacam itu, semua pihak terlibat memiliki hak yang sama dan tidak ada yang dirugikan secara tidak adil. Hal ini berkontribusi pada menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat, serta meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Transaksi syariah mendukung tujuan ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menempatkan kepentingan kolektif masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, transaksi syariah membantu dalam membangun masyarakat yang stabil, adil, dan berkelanjutan, di mana kesejahteraan bersama menjadi prioritas utama.

Pengendalian transaksi syariah oleh pemerintah sangatlah vital dalam menjaga integritas ekonomi syariah. Langkah ini tidak hanya melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap sistem ekonomi tersebut. Dengan menegakkan standar-standar ketat dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pemerintah dapat mencegah penyalahgunaan sistem oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta memastikan bahwa keadilan dan kesetaraan dipertahankan dalam semua aspek ekonomi.

Praktik haram dan batil dalam transaksi syariah dapat menyebabkan berbagai masalah umum, termasuk penipuan, riba, dan gharar. Penipuan dapat terjadi ketika salah satu pihak terlibat dalam transaksi dengan cara yang tidak jujur atau mengelabui pihak lainnya. Riba, yang merupakan praktik peminjaman uang dengan pembayaran bunga, bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat menciptakan ketidakadilan serta ketergantungan finansial. Selain itu, gharar, atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan di pasar.

Dampak negatif dari praktik-praktik tersebut terhadap masyarakat dan ekonomi secara umum sangatlah signifikan. Penipuan dalam transaksi dapat merusak kepercayaan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Riba menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil dan memperburuk kesenjangan sosial, sementara gharar dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat. Secara

keseluruhan, praktik haram dan batil dalam transaksi syariah tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Peran pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan ekonomi, terutama dalam konteks syariah, mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menegakkan regulasi yang memastikan bahwa transaksi ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk menetapkan standar dan pedoman yang jelas untuk transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis lainnya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan regulasi ini dan menegakkan hukum terhadap pelanggar. Ini melibatkan pembentukan lembaga-lembaga pengawasan dan regulasi khusus yang bertanggung jawab untuk memantau aktivitas ekonomi dan menindak pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Pentingnya peran pemerintah dalam hal ini tidak hanya terletak pada menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga dalam memastikan stabilitas dan keadilan dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. Dengan pengaturan dan pengawasan yang efektif, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi peran pemerintah dalam pengendalian transaksi syariah yang berkaitan dengan praktik haram dan batil. Dengan fokus pada praktik-praktik tersebut, jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pemerintah dapat lebih efektif dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya tersebut.

Dari penelitian ini, diharapkan adanya rekomendasi kebijakan atau strategi pengawasan yang lebih efektif dari pemerintah. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap transaksi syariah, mengurangi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi, regulator, dan akademisi dalam memahami dinamika ekonomi syariah dan cara-cara untuk meningkatkan integritasnya melalui tindakan pemerintah yang tepat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif untuk memahami peran pemerintah dalam pengendalian transaksi syariah yang berkaitan dengan praktik haram dan batil. Metodologi penelitian ini didasarkan pada pendekatan analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pendekatan ini melibatkan praktek pengawasan pemerintah, dan efektivitasnya dalam menangani praktik haram dan batil dalam transaksi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif dan relevan tentang peran pemerintah dalam menjaga integritas ekonomi syariah.

Hasil Dan Pembahasan

Peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi transaksi syariah terkait praktik haram dan batil merupakan landasan penting dalam memastikan integritas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai regulator utama, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan ketat untuk mengatur transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, mereka menetapkan standar yang mengatur praktik-praktik yang dilarang secara agama, seperti riba dan gharar, serta menegakkan aturan tersebut melalui pengawasan yang efektif. Melalui peran ini, pemerintah memiliki peran kunci dalam menjaga keadilan, keberlanjutan, dan kepercayaan dalam ekonomi syariah.

Penilaian terhadap keefektifan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat mengungkap sejumlah aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Pertama, evaluasi tersebut harus mempertimbangkan sejauh mana regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dengan jelas dan konsisten. Diperlukan analisis apakah regulasi tersebut memberikan panduan yang memadai bagi pelaku ekonomi untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta apakah regulasi tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh sektor ekonomi.

Selanjutnya, penilaian harus melihat seberapa efektif lembaga-lembaga pengawasan yang ada dalam memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penting untuk mengevaluasi apakah lembaga-lembaga tersebut memiliki sumber daya yang memadai, keahlian, dan otoritas untuk melakukan tugas pengawasan mereka secara efektif. Selain itu, penting juga untuk menilai respons pemerintah terhadap pelanggaran, termasuk seberapa cepat dan seberapa tegas tindakan yang diambil dalam menanggapi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dengan melakukan penilaian ini secara menyeluruh, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan yang telah diambil oleh pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan, serta mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menjaga integritas ekonomi syariah.

Kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah terkait transaksi syariah meliputi berbagai aspek dalam rangka mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu kebijakan yang umum adalah penetapan undang-undang dan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk larangan terhadap riba, gharar, dan praktik-praktik haram lainnya. Selain itu, pemerintah juga seringkali membentuk lembaga-lembaga pengawasan dan regulator khusus untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi ini.

Di sektor perbankan dan keuangan, pemerintah biasanya menerapkan regulasi yang mengatur pendirian dan operasi lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Regulasi ini mencakup persyaratan modal, tata kelola perusahaan, pelaporan keuangan, dan aspek lain yang relevan dengan operasi bank syariah. Pemerintah juga seringkali menerapkan regulasi yang mengatur produk-produk keuangan

syariah, termasuk sertifikasi dan standarisasi produk, serta pengungkapan informasi kepada nasabah.

Selain itu, dalam sektor pasar modal, pemerintah juga menerapkan regulasi yang mengatur transaksi saham syariah dan obligasi syariah. Regulasi ini mencakup kriteria untuk menentukan saham atau obligasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, prosedur penerbitan dan penawaran umum, serta pengawasan terhadap transaksi di pasar modal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah terkait transaksi syariah bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Analisis terhadap kecukupan dan kejelasan regulasi dalam mencegah praktik haram dan batil dalam transaksi syariah merupakan aspek kritis dalam evaluasi efektivitas kerangka regulasi yang ada. Kecukupan regulasi merujuk pada sejauh mana regulasi tersebut mampu mengidentifikasi dan melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dengan cermat dan komprehensif. Ini mencakup apakah regulasi mencakup semua praktik haram dan batil yang relevan, serta apakah ada celah atau kekurangan dalam cakupan regulasi tersebut.

Selanjutnya, kejelasan regulasi merujuk pada sejauh mana regulasi tersebut memberikan panduan yang jelas dan memadai bagi pelaku ekonomi untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang jelas akan memberikan petunjuk yang jelas tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan dalam transaksi syariah, sehingga meminimalkan ambiguitas dan kesalahpahaman di antara pelaku ekonomi. Ini mencakup definisi yang jelas tentang praktik-praktik yang dianggap haram atau batil, serta prosedur yang jelas untuk pematuhan dan penegakan hukum.

Dengan melakukan analisis terhadap kecukupan dan kejelasan regulasi ini, dapat diidentifikasi potensi kelemahan dalam kerangka regulasi yang ada. Misalnya, jika regulasi tidak cukup komprehensif dalam mencakup semua praktik haram dan batil yang relevan, atau jika regulasi tersebut kurang jelas dalam memberikan panduan kepada pelaku ekonomi, maka dapat menyebabkan celah dalam penegakan hukum dan meningkatkan risiko pelanggaran. Oleh karena itu, perbaikan atau pembaharuan regulasi mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa kerangka regulasi yang ada cukup kuat dan jelas dalam mencegah praktik haram dan batil dalam transaksi syariah.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan praktik haram dan batil dalam transaksi syariah merupakan hal yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Salah satu tantangan utama adalah kendala hukum yang terkadang muncul karena perbedaan interpretasi atau implementasi regulasi syariah di berbagai yurisdiksi. Ini bisa menjadi masalah terutama dalam kasus-kasus lintas batas atau di negara-negara dengan sistem hukum campuran.

Selain itu, tantangan sosial juga seringkali muncul, termasuk resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang mungkin memiliki kepentingan dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, di beberapa masyarakat, praktik-praktik tertentu yang dianggap sebagai haram atau batil mungkin memiliki akar budaya atau tradisional yang kuat, sehingga mengubah perilaku atau kebiasaan tersebut menjadi sulit.

Tantangan ekonomi juga menjadi faktor penting. Sebagian besar transaksi ekonomi didorong oleh faktor-faktor ekonomi, dan adopsi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi sering kali memerlukan pengorbanan atau penyesuaian dari perspektif ekonomi konvensional. Misalnya, penggunaan sistem keuangan syariah dapat menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas dan ketersediaan produk, serta kebutuhan akan pemahaman dan keahlian khusus.

Tinjauan terhadap hambatan-hambatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi strategi dan pendekatan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam mengendalikan praktik haram dan batil dalam transaksi syariah. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan harmonisasi dan konsistensi dalam regulasi, mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, serta merancang kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Ringkasan temuan-temuan utama dari penelitian ini menyoroti beberapa hal penting. Pertama, penelitian menemukan bahwa regulasi syariah yang diterapkan oleh pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatur dan mengawasi transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, beberapa tantangan yang signifikan dihadapi, termasuk ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi di berbagai sektor ekonomi dan kesenjangan dalam pemahaman dan penegakan hukum.

Selanjutnya, penelitian juga menemukan bahwa kejelasan dan kecukupan regulasi sering kali menjadi perhatian utama. Meskipun beberapa negara telah memperkuat kerangka regulasi mereka terkait praktik haram dan batil, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan kejelasan dalam definisi dan cakupan praktik-praktik yang dilarang serta peningkatan kecukupan dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam penyimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mengendalikan transaksi syariah terkait praktik haram dan batil memiliki dampak yang signifikan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, pemerintah perlu meningkatkan harmonisasi dan konsistensi dalam regulasi, meningkatkan kejelasan dan kecukupan regulasi, serta memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum yang bertanggung jawab atas pemantauan transaksi syariah. Dengan demikian, pemerintah dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memastikan integritas ekonomi syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki pengendalian transaksi syariah mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, pemerintah dapat memperkuat harmonisasi dan konsistensi dalam regulasi syariah di berbagai sektor ekonomi. Ini melibatkan kerja sama antar lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan bersifat komprehensif, konsisten, dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan.

Selanjutnya, pemerintah dapat meningkatkan kejelasan dan kecukupan regulasi syariah dengan melakukan revisi atau pembaruan terhadap peraturan yang ada. Ini termasuk memberikan definisi yang lebih jelas tentang praktik haram dan batil, serta memperkuat prosedur pengawasan dan penegakan hukum untuk menangani pelanggaran.

Selain itu, pemerintah dapat memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum yang bertanggung jawab atas pengendalian transaksi syariah. Ini melibatkan peningkatan sumber daya manusia, teknologi, dan kapasitas institusional untuk melakukan pemantauan dan penegakan hukum dengan lebih efektif.

Saran kepada pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat regulasi atau meningkatkan pendekatan lainnya dalam mengatasi tantangan yang diidentifikasi termasuk memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mempromosikan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pendidikan dan pelatihan lebih lanjut tentang prinsip-prinsip syariah dan pentingnya kepatuhan dapat diperluas kepada masyarakat umum dan pelaku ekonomi. Langkah-langkah ini dapat membantu memperkuat budaya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi secara keseluruhan.

Implikasi dari temuan-temuan penelitian ini bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan sangatlah signifikan. Bagi praktisi, temuan ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi transaksi syariah, sehingga mereka dapat lebih memahami lingkungan regulasi yang mengatur praktik ekonomi syariah. Hal ini dapat membantu praktisi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasi mereka, serta mengidentifikasi potensi risiko atau celah dalam kepatuhan.

Bagi akademisi, temuan ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang topik terkait, seperti analisis perbandingan antara kerangka regulasi di berbagai negara atau studi tentang dampak regulasi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Hal ini dapat membantu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara regulasi, kepatuhan, dan kinerja ekonomi syariah.

Sementara itu, bagi pembuat kebijakan, temuan ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang dalam mengatur transaksi syariah. Hal ini dapat membantu mereka merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah, termasuk pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan upaya untuk mempromosikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kontribusi penelitian ini terhadap pemahaman kita tentang peran pemerintah dalam menjaga integritas transaksi syariah sangatlah penting. Dengan mengungkap kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam pengaturan dan pengawasan transaksi syariah, penelitian ini membantu memperkuat kesadaran akan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Ini juga membuka pintu untuk pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga integritas ekonomi syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka prinsip-prinsip Islam.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi transaksi syariah terkait praktik haram dan batil. Temuan penelitian mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk ketidakcukupan dan kekurangan dalam regulasi, serta hambatan-hambatan sosial, hukum, dan ekonomi.

Rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah yang diajukan termasuk memperkuat harmonisasi dan konsistensi dalam regulasi, meningkatkan kejelasan dan kecukupan regulasi, serta memperkuat lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum yang bertanggung

jawab atas pengendalian transaksi syariah. Sementara itu, penelitian ini juga memberikan implikasi yang signifikan bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan, membuka jalan bagi pengembangan pemahaman yang lebih dalam tentang peran pemerintah dalam menjaga integritas transaksi syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang kompleksitas dan relevansi peran pemerintah dalam mengatur ekonomi syariah. Dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan, diharapkan bahwa pemerintah dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Azizah, S. N., & Darmawan. (2024). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasanah, R. (2018). Pengawasan Internal dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah. *skripsi*, 48-54.
- Ishak, K. (n.d.). The Role of Islamic Finance In Economic Development. *STIE Syariah Bengkalis*, 131-143.
- Itang. (2014). Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi. *Ahkam*, 213-224.
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH